

BUPATI BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 421.3/ 340 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan peningkatan sumber daya manusia, antar lain perlu penambahan daya tampung lulusan SD/MI dengan mendirikan/mengembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu);
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan, di SD Negeri Karang Bokong 2 Kecamatan Larangan, SD Pandansari Kecamatan Brebes, SD Waru 02 Kecamatan Bantarkawung, SD Bentarsari 5 Kecamatan Salem dan SD Igir Klanceng 2 Kecamatan Sirampog layak untuk didirikan/ dikembangkan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu);
- c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24 Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002

tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan:

Surat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama Tanggal 5 April 2005 Nomor: 324/C3/DS/2005 perihal Penetapan Lokasi Calon SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar terpadu).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Pendirian SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2005/2006, dengan ketentuan :

- 1. Mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- 2. Pengelolaan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterapkan adalah Satu Pengelola, dengan demikian Kepala SD sekaligus menjabat Kepala SMP Negeri 1 Satu Atap.
- Penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

KEDUA

: Nama dan lokasi sekolah dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD I dan APBD II serta sumber dana lain yang syah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 20 - AGUSTUS - 2005,

A BUPATI BREBES,

INDRA KUSUMA

Tembusan:

- 1. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- 3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes;
- 6. Kepala BPKD Kabupaten Brebes di Brebes;
- 7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Brebes di Brebes;
- 8. Himpunan Keputusan Bupati;